

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi 2, C*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2017.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta : Erlangga.
- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Fathiyah, S. A., Majid, H., dan Masnun. (2021). *Analisis Belanja Daerah Pemerintahan Provinsi Jambi*. J-MAS.
- Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haruman, Tendi., dan Rahayu, Sri. 2007. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kawatu, Freddy Samuel. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : DEEPUBLISH.
- Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus dan A.Purwonugroho. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.

Nafarin. 2015. *Penganggaran Perusahaan Edisi 3*. Cetakan Kedua, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi., dan Hertianti, Ayuningtyas. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Indonesia). Diakses pada 22 Juli 2024 dari [PP No. 12 Tahun 2019 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/).

Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Indonesia). Diakses pada 22 Juli 2024 dari [PP No. 12 Tahun 2019 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/).

Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia). Diakses pada 20 Juli 2024 dari [UU No. 23 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Indonesia). Diakses pada 22 Juli 2024 dari [PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2023 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Indonesia). Diakses pada 23 Juli 2024 dari [PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 \(bpk.go.id\)](https://peraturan.pdk.go.id/peraturan/PERMENDAGRI.No.77.Tahun.2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 (Indonesia). Diakses pada 22 Juli 2024 dari [PMK No. 83 Tahun 2023 \(bpk.go.id\)](https://peraturan.pdk.go.id/peraturan/PMK.No.83.Tahun.2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Indonesia). Diakses pada 17 Juli 2024 dari [PP No. 12 Tahun 2019 \(bpk.go.id\)](https://peraturan.pdk.go.id/peraturan/PP.No.12.Tahun.2019).

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Indonesia). Diakses pada 15 Juli 2024 dari [PP No. 71 Tahun 2010 \(bpk.go.id\)](https://peraturan.pdk.go.id/peraturan/PP.No.71.Tahun.2010).

PSAP 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Indonesia). Diakses pada 23 Juli 2024 dari [PP No. 71 Tahun 2010 \(bpk.go.id\)](https://peraturan.pdk.go.id/peraturan/PP.No.71.Tahun.2010).

Rahayu, Sri., dan Rahcman, Andry. 2013. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rudianto. 2009. Penganggaran. Jakarta : Erlangga.

Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta : Salemba Empat.

Sholeh, Chabib., dan Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung : Fokusmedia.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Supriyono. 2002. *Akuntansi Manajemen I*. Yogyakarta : BPFE.

Tim Penyusun Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. *Modul Belanja Daerah – Kursus Keuangan Daerah (KKD)* 2013. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Indonesia). Diakses pada 18 Juli 2024 dari [UU No. 1 Tahun 2022 \(bpk.go.id\)](http://bpk.go.id).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Indonesia). Diakses pada 26 Juli 2024 dari [UU No. 17 Tahun 2003 \(bpk.go.id\)](http://bpk.go.id).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia). Diakses pada 20 Juli 2024 dari [UU No. 23 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](http://bpk.go.id).

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Grafindo.

Tim bagian Penyusun Rencana Bappeda Prov. Sumatera Barat. *Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2021-2026*.

